

Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Terhadap Perekonomian Kabupaten Majalengka

Jaka Sriyana* dan Fitri Rosyidah**

*Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ** Alumnus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Abstract

This paper focusses on fiscal policy practice in local government. This research attempts to analyze the impact of government spending for education, health and infrastructure to regional gross domestic product in Kabupaten Majalengka for the period of 1988-2004. We used simple linear regression to test the relationship between independent variabels and dependent variable. In this research, we try to adopt the Skinner (1987). The result of analysis shows that all independent variables, namely government spending for education, health and infrastructure, are statistically significant influence the dependent variable. The implications of this finding is that the level of income is strongly depend on local government activities.

Keywords: Fiscal, Government, Policy, Spending

Pembangunan dipandang sebagai suatu proses *multidimensional* yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pada hakekatnya, pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba "lebih baik", secara material maupun spiritual. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan

pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan

semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor.

Perekonomian Kabupaten Majalengka

Perekonomian daerah umumnya dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi selalu dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi ekonominya, perhitungan PDRB menggunakan tahun dasar 1993 dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga terhadap sektor-sektor yang menjadi indikator dalam perhitungan PDRB.

ekonomi Kabupaten Majalengka sebesar 7,75% meningkat sampai 8,53% pada tahun 1996. Tahun 1997 awal dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka turun menjadi 5,06% dan mencapai angka minus 9,35% pada tahun 1998. Tahun 1999 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka kembali naik menjadi 3,45% dan terus meningkat mencapai 4,92% pada tahun 2001 (tabel 1). Kenaikan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan karena dampak positif dari diberlakukannya otonomi daerah yang mulai diberlakukan sejak tahun 2001 dan sumbangan atau kontribusi sektor yang cukup potensial terhadap PDRB juga

TABEL 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka 1994-2002 (dalam Juta)

Tahun	PDRB (Harga konstan 1993)	Laju Pertumbuhan (%)
1994	931.056.24	7.75
1995	1.008.596.61	8.33
1996	1.094.661.75	8.53
1997	1.150.027.29	5.06
1998	1.042.472.24	-9.35
1999	1.078.387.28	3.45
2000	1.126.602.16	4.47
2001	1.182.141.67	4.92
2002	1.220.769.35	3.27
Rata-rata	981.634.96	4.04

Sumber :Majalengka dalam Angka, BPS Kabupaten Majalengka, 1994-2003

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka selama tahun 1994 sampai 2002 secara umum mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya PDRB Kabupaten Majalengka berdasarkan harga konstan 1993 rata-rata PDRB Kabupaten Majalengka sebesar 981,634,96 juta Rupiah dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,04%. Tahun 1994 pertumbuhan

semakin meningkat, sektor tersebut antara lain, jasa, perdagangan, pertanian, serta industri pengolahan di Kabupaten Majalengka.

Di Kabupaten Majalengka sektor yang terbesar kontribusinya terhadap perekonomian adalah sektor pertanian, diikuti oleh sektor perdagangan dan jasa. Besarnya kontribusi sektor pertanian

terhadap PDRB karena hampir sebagian besar penduduk Kabupaten Majalengka bergerak dalam sektor ini. Sektor kedua adalah sektor perdagangan selain sektor perdagangan, sektor jasa menjadi sektor cukup dominan. Hal ini disebabkan kondisi geografis Kabupaten Majalengka yang lebih banyak berkondisi pegunungan, sehingga sektor jasa transportasi memainkan peranan penting sebagai penunjang produktifitas masyarakat, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan atau daerah

oleh status sosial ekonomi rumah tangga (pendapatan, budaya, dan sebagainya), seperti pada pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan yang ideal juga harus memungkinkan untuk dapat menyediakan seluruh pelayanan pendidikan dan alternatif-alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat antar tingkat pendapatan yang berbeda. Ketentuan pelayanan pendidikan harus pada saat yang tepat, kualitas yang memadai, sehingga memungkinkan, kesesuaian dengan norma di daerah dan

TABEL 2. PDRB Kabupaten Majalengka Berdasarkan Lapangan Usaha 1997-2002

LAPANGAN USAHA	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Pertanian	324.269,19	325.488,60	353.718,69	367.435,36	380.098,72	370.144,30
Pertambangan dan Penggalian	42.600,00	30.578,27	19.543,53	23.489,85	25.580,51	28.767,27
industri Pengolahan	173.664,00	137.330,04	138.184,01	145.489,30	156.589,80	165.877,50
Listrik, gas dan air bersih	4.900,00	4.656,22	4.948,24	5.159,97	5.659,33	6.242,89
Bangunan	70.680,00	60.434,44	59.250,00	62.545,00	64.603,52	70.184,77
Perdagangan, Hotel & Restoran	229.514,00	195.835,98	205.469,95	212.940,23	224.225,15	239.985,81
Pengangkutan dan Telekomunikasi	61.755,67	63.204,96	67.723,07	72.593,82	76.603,44	81.768,43
Keuangan, Persewaan, & Jasa perusahaan	64.738,77	48.766,84	50.190,58	53.147,32	54.815,72	57.184,04
Jasa-Jasa	175.485,00	174.020,87	177.687,96	183.801,28	193965,48	200.614,34
PDRB	1.147.606,63	1.040.316,22	1.076.716,03	1.126.602,13	1.182.141,67	1.220.769,35

Sumber :Majalengka dalam Angka, BPS Kabupaten Majalengka, 1998-2003

terpencil. Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2. di bawah ini .

Pengeluaran Pembangunan Pendidikan Kabupaten Majalengka

Tingginya kualitas pendidikan akan menentukan pelayanan pendidikan, yang tersedia pada daerah. Hal ini juga ditentukan

memenuhi harapan masyarakat. Pelayanan pendidikan ini mencakup pelayanan pendidikan dasar seperti SD, SMP, SMU, dan sekolah tinggi. Berikut tabel 3 yang menunjukkan besarnya pengeluaran pembangunan pendidikan Kabupaten Majalengka pada tahun 1988-2002.

Berdasarkan tabel 3 di atas, data tahun 1988-2002 menunjukkan besarnya penge-

TABEL 3

Pengeluaran Pembangunan Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 1988-2002

Tahun	Pengeluaran Pendidikan (ribu Rp)	% Thd APBD	Tahun	Pengeluaran Pendidikan (ribu Rp)	% Thd APBD
1988	57.069,00	0.8	1996	2.947.795,00	8.1
1989	452.614,00	4.8	1997	3.676.345,00	7.2
1990	1.311.773,00	8.7	1998	5.587.434,00	5.8
1991	2.389.544,00	13.9	1999	3.002.092,00	2.6
1992	2.974.470,00	14.1	2000	1.806.829,00	1.6
1993	1.378.815,00	5.6	2001	7.965.000,00	3.2
1994	2.382.175,00	8.9	2002	6.315.140,00	2.0
1995	3.036.135,00	9.4			

Sumber : Majalengka dalam angka, BPS Majalengka (berbagai terbitan) Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah, BPS Indonesia (berbagai terbitan)

luaran pemerintah untuk sektor pendidikan Kabupaten Majalengka mengalami fluktuasi. Pengeluaran pembangunan sektor pendidikan yang terendah adalah sebesar 57.069,00 ribu rupiah pada tahun 1988, dan tertinggi adalah sebesar 7.965.000,00 ribu rupiah pada tahun 2001. Besar dan kecilnya perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan umumnya lebih layak dilihat dari persentasenya terhadap total pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam APBD pemerintah daerah setiap tahunnya. Berdasarkan persentasenya terhadap total APBD pengeluaran pembangunan sektor pendidikan terbesar terjadi pada tahun 1992 yaitu 14,1% dan terendah pada tahun 1988 yaitu 0,8%. Pada tahun 1988 sampai 1992 persentase pengeluaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Majalengka terus mengalami peningkatan mencapai 14,1% dan tahun 1993 turun menjadi 5,6% dan kemudian meningkat lagi tahun 1994 sampai pada tahun 1996 namun peningkatannya tidak sampai 10% dari total APBD. Tahun 1997 persentase pengeluaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Majalengka turun dan ini berlangsung sampai pada tahun

2000. Tahun 2001 pengeluaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Majalengka meningkat namun hanya 3,2% dari total APBD dan kemudian turun lagi 2,0% pada tahun 2002. Rendahnya pengeluaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Majalengka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mempunyai perhatian besar terhadap pendidikan di daerah, padahal tinggi dan rendahnya produktivitas bagi pencapaian perekonomian daerah sangat bergantung pada tinggi dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang salah satunya ditentukan dari tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk suatu daerah.

Pengeluaran Pembangunan Kesehatan Kabupaten Majalengka

Determinan kesehatan adalah status sosial-ekonomi rumah tangga (pendapatan, budaya, dan sebagainya); higienitas dan sanitasi lingkungan (air bersih, toilet, rumah, dan sebagainya); usaha-usaha kesehatan (kesehatan ibu dan bayi, keluarga berencana, imunisasi, perbaikan gizi, dan

lain-lain) dan kesuburan. pelayanan kesehatan adalah determinan utama dari tingkat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang ideal harus dapat menyediakan semua pelayanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai tingkat pendidikan. Penyediaan pelayanan kesehatan harus berada pada waktu yang tepat dan kualitas yang tepat, berkesinambungan, sejalan dengan norma masyarakat dan memenuhi harapan masyarakat. Besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini :

pengeluaran kesehatan terbesar hanya mencapai 6,9% pada tahun 1990 dan terkecil pada tahun 1988 sebesar 0,3%. Tahun 1998 dimana puncak krisis ekonomi terjadi di Indonesia, pengeluaran kesehatan pemerintah Kabupaten Majalengka turun dari 1,4% menjadi 0,7% pada tahun 1999 dan kemudian meningkat sebesar 0,1% pada tahun 2000 menjadi 0,8%. Pada saat otonomi daerah diberlakukan yaitu pada tahun 2001 persentase pengeluaran kesehatan hanya 2,2% dari total APBD dan kemudian turun menjadi 1,1% pada tahun 2002.

TABEL 4. Pengeluaran Pembangunan Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 1988-2002

Tahun	Pengeluaran Kesehatan (ribu Rp)	%Thd APBD	Tahun	Pengeluaran Kesehatan (ribu Rp)	% Thd APBD
1988	24.957,00	0.3	1996	835.551,00	2.3
1989	546.515,00	5.8	1997	1.264.442,32	2.5
1990	1.030.825,00	6.9	1998	1.394.168,00	1.4
1991	665.524,00	3.9	1999	789.152,00	0.7
1992	806.060,00	3.8	2000	952.620,00	0.8
1993	1.294.397,00	5.3	2001	5.376.889,00	2.2
1994	947.678,00	3.6	2002	3.309.472,19	1.1
1995	741.390,14	2.3			

Sumber : Majalengka dalam angka, BPS Majalengka (berbagai terbitan) Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah, BPS Indonesia (berbagai terbitan)

Berdasarkan tabel 4 diatas, data tahun 1988 sampai 2002 menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran pemerintah Kabupaten Majalengka terhadap pembangunan kesehatan tidak jauh berbeda dengan pengeluaran pendidikan, berfluktuasi setiap tahunnya. Secara keseluruhan pada tahun pengamatan yaitu tahun 1988 sampai 2002, besarnya persentase pengeluaran kesehatan di Kabupaten Majalengka berada dibawah 10% dari total APBD. Persentase

Kecilnya pengeluaran pemerintah Kabupaten Majalengka dalam sektor kesehatan ini menunjukkan masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, khususnya pada masyarakat yang kurang mampu (miskin). Pelayanan kesehatan yang berkualitas idealnya ditujukan pada perbaikan gizi, upaya jangka waktu harapan hidup, penurunan kematian bayi dan ibu melahirkan. Secara umum

dapat dikatakan bahwa masalah kekurangan gizi dan buruknya kondisi kesehatan lebih disebabkan oleh kemiskinan atau ketidakmampuan orang-orang miskin untuk membayar biaya kesehatan, dan untuk menghindari hal ini perlu adanya upaya dan perhatian pemerintah daerah bagaimana agar keterbatasan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan dapat diprioritaskan dengan cara lebih meningkatkan pengeluaran pembangunan khususnya di sektor kesehatan.

Pengeluaran Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Majalengka

Tersedianya prasarana/infrastruktur yang cukup merupakan salah satu faktor penting berjalannya dengan baik proses pembangunan suatu daerah. Gravitasi ekonomi sangat tergantung kepada sarana

Kabupaten Majalengka yang mempunyai karakteristik geografi dan topografi yang lebih banyak pegunungan, memerlukan pembangunan infrastruktur yang kuat dalam rangka membuka akses kedaerah terpencil, membuka akses ekonomi, dan pengembangan potensi-potensi yang dimiliki dan masih belum digarap. Oleh karena itu, persoalan-persoalan infrastruktur ini harus menjadi prioritas bagi Kabupaten Majalengka, dimana pemerintah Kabupaten Majalengka harus dapat mengalokasikan dana lebih besar untuk belanja pembangunan khususnya di sektor infrastruktur. Dalam tabel 5 ditunjukkan besarnya pengeluaran pembangunan pemerintah Kabupaten Majalengka selama tahun 1988 sampai 2002.

Berdasarkan tabel 5 di atas, dapat dilihat besarnya pengeluaran pembangunan

TABEL 5. Pengeluaran Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Majalengka Tahun 1988-2002

Tahun	Pengeluaran Infrastruktur (ribu Rp)	%Thd APBD	Tahun	Pengeluaran Infrastruktur (ribu Rp)	% Thd APBD
1988	1.907.827,00	27.4	1996	10.716.768,00	29.6
1989	2.751.847,00	29.4	1997	11.204.558,20	22.1
1990	5.768.153,00	38.4	1998	22.593.714,00	23.3
1991	5.511.329,00	31.9	1999	14.706.974,00	12.7
1992	7.133.892,00	33.7	2000	16.309.566,00	14.5
1993	7.704.462,00	31.3	2001	28.336.021,00	11.5
1994	8.932.059,00	33.6	2002	37.237.286,41	12.0
1995	9.325.516,00	29.0			

Sumber : Majalengka dalam angka, BPS Majalengka (berbagai terbitan) Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah, BPS Indonesia (berbagai terbitan)

lalu lintas seperti jalan, jembatan, lalu lintas barang dan jasa-jasa serta mobilitas faktor produksi sangat ditentukan oleh prasarana/ infrastruktur yang ada.

infrasturuktur di Kabupaten Majalengka secara keseluruhan dari tahun 1988 sampai 2002 besarnya di atas 20% dari total APBD. Persentase terbesar dicapai pada tahun

1992 yaitu 33,7% dan terkecil sebesar 11,5% pada tahun 2001. Pada saat krisis ekonomi terjadi di Indonesia persentase pengeluaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majalengka terhadap APBD masih berkisar di atas 20% yaitu 22,1% namun sejak tahun 1999 besarnya pengeluaran pembangunan pada sektor ini mulai menurun dibawah 20% dari total APBD. Tahun 1999 hanya 12,7% kemudian meningkat menjadi 14,5% pada tahun 2000. Tahun 2001 dimana awal diberlakukannya otonomi daerah, pengeluaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majalengka turun menjadi 11,5% dan kemudian meningkat kembali 0,5 % menjadi 12,0% dari total APBD pada tahun 2002.

Kajian Pustaka

Rahayu (2001), meneliti peranan sektor publik dan sektor swasta dalam pertumbuhan ekonomi regional dan kesenjangan yang terjadi di Indonesia selama tahun 1987-1996. Alat analisis yang digunakan metode regresi data panel model pertumbuhan ekonomi regional. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah pada seluruh lokasi penelitian dalam pertumbuhan ekonomi sangat signifikan. Lebih lanjut hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam membuat perencanaan ekonomi sangat dibutuhkan dan akan sangat membantu pemerintah pusat dalam memberikan bantuan kepada pemerintah daerah agar lebih efisien.

Wahyuni (2004), meneliti peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang di sebagian besar Negara Asia Pasifik yang mempunyai kesamaan latar belakang ekonomi periode 1980-2000. Alat analisis yang digunakan adalah regresi *unbalanced panel method*.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa koefisien pangsa pengeluaran pemerintah terhadap GDP adalah negatif signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa komponen konsumsi mendominasi pengeluaran anggaran pemerintah. Hasil ini sejalan dengan kenyataan bahwa sebagian besar negara-negara di kawasan penelitian menemui masalah dalam manajemen pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran yang besar untuk konsumsi bagi kepentingan pemerintah sendiri menutupi efek positif investasi publik. Namun demikian hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa koefisien penerimaan pajak bertanda positif. Hasil yang signifikan menjelaskan adanya hubungan yang kuat antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi dimana meningkatnya penerimaan pajak mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu kebijakan pemerintah sebaiknya mendukung akumulasi penerimaan pemerintah yang mempunyai peran potensial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Setiati (1996), mengkaji peran investasi, mutu modal manusia, perubahan demografi, dan sektor pemerintah dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis dilakukan terhadap 25 propinsi di Indonesia untuk periode 1983/1984 s.d. 1992/1993. Hasil analisis menunjukkan kesimpulan bahwa kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah yang merupakan proksi besarnya sektor pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun kecil dari segi besarnya. Di satu pihak, hal ini sesuai dengan arah kebijakan yang ditempuh, dimana pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi memang tidak diharapkan datang dari sektor pemerintah

melainkan dari sektor swasta (jumlah anggaran pemerintah daerah sangat terbatas). Di pihak lain, mengingat bahwa peranan pemerintah masih tetap diperlukan dalam konteks pembangunan bangsa, maka perlu diperhatikan adanya kemungkinan ketidakefisienan penggunaan anggaran yang menyebabkan *output* yang dihasilkan dari anggaran itu tidak sebesar yang diharapkan.

Rosyadi (2000) melakukan kajian terhadap hubungan antara Pengeluaran Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi selama periode 1979-1998. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi yang diestimasi dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dan menerapkan model kausalitas koreksi kesalahan (ECM). Analisis dilakukan terhadap data sekunder berupa PDRB Kota Jambi berdasarkan harga konstan (tanpa migas) dan Pengeluaran Pembangunan Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode penelitian terdapat pola hubungan satu arah antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pembangunan. Dalam jangka pendek pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Atmaja (2001) telah menganalisis pengaruh investasi swasta, investasi sektor publik yang meliputi investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, penerimaan pemerintah dari sektor pajak/non pajak serta pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian kabupaten dan kota di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi swasta memegang peranan yang sangat dominan di Propinsi Bali, terlihat dari signifikansinya melebihi investasi pemerintah. Hal ini menunjukkan dalam

suatu perekonomian diharapkan peranan pemerintah semakin berkurang, hanya sebagai fasilitator dan peranan masyarakat swasta semakin meningkat.

Adanya keterkaitan yang erat antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ditunjukkan pula dalam sejarah munculnya teori-teori pembangunan ekonomi. Menurut Todaro (2000) dalam kepustakaan pembangunan ekonomi pasca Perang Dunia II terdapat lima pendekatan utama dalam aliran pemikiran tentang teori-teori pembangunan, yaitu model pertumbuhan bertahap linier, model pembangunan struktural, model ketergantungan internasional, kontrarevolusi pasar bebas neoklasik, dan model pertumbuhan endogen.

Blakely (1994) juga mengemukakan akan pentingnya peran pemerintah, dengan mengemukakan sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses tempat pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999: 298). Pembangunan ekonomi daerah merupakan pembangunan daerah di sektor ekonomi yang perumusan dan pelaksanaannya tetap berpegang pada tujuan pembangunan daerah, sedangkan pembangunan daerah merupakan upaya terpadu yang menggabungkan beberapa

dimensi kebijakan dari seluruh sektor yang ada. Tujuan pembangunan daerah adalah mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Kuncoro (2004) melihat tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Menurut Arsyad (1999: 214-220) ada tiga faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat yaitu; pertama, akumulasi modal (*capital accumulation*) yang meliputi semua bentuk atau jenis yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia; kedua, pertumbuhan penduduk (*growth in population*), yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja; dan kemajuan teknologi (*technological progress*), yang bagi kebanyakan ekonom dan terutama teknokrat merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Kuncoro (2004) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah tentu memiliki sasaran fundamental yang ingin dicapai oleh masing-masing daerah antara lain meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya pendapatan per kapita, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

Pemerintah perlu menetapkan kebijaksanaan yang tepat demi berhasilnya rencana pembangunan dan untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Unsur-unsur kebijakan ini meliputi: (i) penyelidikan potensi pembangunan; survei sumber daya nasional, penelitian ilmiah; penelitian pasar; (ii) penyediaan prasarana yang memadai (air, listrik, transportasi dan telekomunikasi) apakah oleh badan usaha negara atau swasta; (iii) penyediaan fasilitas latihan khusus dan juga pendidikan umum yang memadai untuk menyediakan ketrampilan yang diperlukan; (iv) perbaikan landasan hukum bagi kegiatan perekonomian, khususnya peraturan yang berkaitan dengan hak atas tanah, perusahaan, dan transaksi ekonomi; (v) bantuan untuk menciptakan pasar yang lebih banyak dan lebih baik; (vi) menemukan dan membantu pengusaha yang potensial, baik dalam negeri maupun luar negeri; (vii) peningkatan pemanfaatan sumber daya secara lebih baik, baik swasta maupun negara (Arsyad, 1999).

Terdapat berbagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian, salah satu diantaranya adalah pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah. Dalam model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Mangkoesoebroto, 1998) bahwa pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar. Hal ini disebabkan oleh karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar.

Dalam konteks perekonomian negara sedang berkembang, peranan kebijakan

fiskal adalah untuk memacu laju pembentukan modal. Kebijakan fiskal juga memainkan peranan penting di dalam rencana pembangunan negara terbelakang. Di dalam perencanaan, suatu keseimbangan harus dicapai baik dalam arti riil maupun dalam arti uang. Dengan kata lain, rencana fisik harus disesuaikan dengan rencana keuangan. Penerapan rencana keuangan dan pencapaian perimbangan dalam arti riil dan keuangan jelas banyak tergantung pada tindakan-tindakan fiskal (Jhingan, 1992).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan di Negara-negara Eropa, U.S. dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, akan tetapi dalam pandangannya tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam pengertian pertumbuhan secara relatif ataukah secara absolut. Apabila yang dimaksud oleh Wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif sebagaimana teori Musgrave, maka hukum Wagner sebagai berikut : dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks.

Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{P_K PP_1}{PPK_1} < \frac{P_K PP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_K PP_n}{PPK_n}$$

$P_K PP$ = Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK = pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2, ..n = jangka waktu (tahun)

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Teori Peacock dan Wiseman sebagai berikut.

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Hipotesis

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan dapat dikemukakan hipotesis bahwa variabel pengeluaran pembangunan sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Majalengka.

Metode Penelitian

Data yang Digunakan

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan berupa data runtut waktu (*Time Series*). Observasi terdiri dari 15 tahun pada Kabupaten Majalengka selama periode 1988-2002. Data tersebut berupa laporan pengeluaran pembangunan pemerintah daerah dalam APBD Kabupaten Majalengka dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka.

Data dan informasi tersebut diperoleh dari :

- 1) Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka;
- 2) Badan Pusat Statistik Indonesia;
- 3) Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpkpd.go.id).

Variabel data yang digunakan dalam penelitian ini.

- 1) APBD yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

di mana Anggaran yaitu anggaran rutin dan pembangunan, Pendapatan yaitu Pendapatan asli daerah dan pendapatan dari instansi yang lebih tinggi dan penerimaan lainnya, Belanja yaitu belanja rutin dan pembangunan (langsung dan tidak langsung) pada Kabupaten Majalengka tahun 1988 – 2002.

- 2) Pengeluaran pembangunan sektor pendidikan adalah besarnya pengeluaran/belanja pembangunan pemerintah pada sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam realisasi APBD Kabupaten Majalengka tahun 1988–2002. Dalam penelitian ini pengeluaran pembangunan sektor pendidikan adalah rasio antara pengeluaran pembangunan pendidikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah Majalengka pada tahun t . Rasio tersebut dihitung dengan rumus ;

$$PPpe_t = \left[\frac{PPpe_t}{Y_t} \right]$$

- 3) Pengeluaran/belanja pembangunan sektor kesehatan adalah besarnya pengeluaran pembangunan pemerintah pada sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita anak dan remaja yang tercermin dalam realisasi APBD Kabupaten Majalengka tahun 1988 – 2002. Dalam penelitian ini pengeluaran pembangunan sektor kesehatan adalah rasio antara pengeluaran pembangunan kesehatan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah Majalengka pada tahun t . Rasio tersebut dihitung dengan rumus;

$$PPks_t = \left[\frac{PPks_t}{Y_t} \right]$$

- 4) Pengeluaran/belanja pembangunan sektor infrastruktur adalah besarnya

pengeluaran pembangunan pemerintah pada sektor sumber daya air dan irigasi, sektor transportasi, sektor pembangunan daerah dan pemukiman dan sektor perumahan dan pemukiman serta sektor pariwisata dan telekomunikasi yang tercermin dalam realisasi APBD Kabupaten Majalengka tahun 1988–2002. Dalam penelitian ini pengeluaran pembangunan sektor infrastruktur adalah rasio antara pengeluaran pembangunan infrastruktur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah Majalengka pada tahun t . Rasio tersebut di hitung dengan rumus ;

$$PPinf_t = \left[\frac{PPinf_t}{Y_t} \right]$$

- 5) Perekonomian daerah dalam penelitian ini, diukur berdasarkan besarnya Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Majalengka berdasarkan harga konstan 1993 selama tahun 1988-2002.

Alat Analisis

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model regresi linier. Dalam penelitian ini, model regresi yang digunakan mengacu pada model yang dikembangkan dari Skinner (1987) yaitu model pertumbuhan ekonomi makro (*macro economic growth model*) yang digunakan oleh Sung Tai Kim (1997) untuk meneliti peranan sektor publik lokal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Korea dari tahun 1970-1991, dengan menggunakan data *cross section* dan *time series* dari sebelas wilayah di Korea dan juga digunakan oleh Rahayu (2001) untuk meneliti peranan sektor publik lokal dan sektor swasta dalam pertumbuhan ekonomi regional dan kesenjangan yang terjadi di Indonesia, dengan menggunakan data *cross section*

dan *time series* dari beberapa provinsi terseleksi di Indonesia dari tahun 1987-1996.

Penelitian ini mengaplikasikan model Kim untuk meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian di daerah Kabupaten Majalengka, tetapi data yang digunakan hanya data *time series* yaitu tahun 1988-2002. Mengacu pada model umum regresi dan model Kim sebagaimana dituliskan di atas, maka model dalam penelitian dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_t = \hat{a}_1 + \hat{a}_2 \left[\frac{Penddk_t}{Y_t} \right] + \hat{a}_3 \left[\frac{Keshtn_t}{Y_t} \right] + \hat{a}_4 \left[\frac{Infra_t}{Y_t} \right] + \mu_t \dots\dots\dots (3)$$

Di mana ;

- Y adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- $Penddk$ adalah Besarnya pengeluaran pembangunan sektor pendidikan
- $Keshtn$ adalah Besarnya pengeluaran pembangunan sektor kesehatan
- $Infra$ adalah Besarnya pengeluaran pembangunan sektor infrastruktur
- μ_t adalah faktor gangguan/ *error term*

Hasil Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan analisis yang dilakukan atas data-data diperoleh hasil seperti dipaparkan pada tabel 6. Hasil analisis menunjukkan adanya kesesuaian antara teori dengan perilaku hubungan antara variabel. Hasil regresi secara umum menunjukkan hubungan yang signifikan antara variabel penjelas yang meliputi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dengan PDRB. Hasil regresi memiliki nilai koefisien determinansi 0,88 yang menunjukkan besarnya pengaruh variasi variabel penjelas dengan variabel terikat. Hasil regresi juga menunjukkan hasil yang tidak memiliki

kasus pelanggaran asumsi klasik autokorelasi. Hal ini berdasarkan uji metode Durban-Watson (DW), dimana nilai DW hitung mencapai 1,89 yang menunjukkan tidak adanya kasus autokorelasi. Begitu pula nilai F statistik menunjukkan hubungan yang signifikan secara serentak antara semua variabel penjelas dengan variabel terikat.

Pengujian juga perlu dilakukan menyangkut masalah tanda dan intensitas hubungan ekonomi dengan cara membandingkan kesesuaian tanda di antara variabel/parameter estimasi dari model yang dipilih dengan hipotesis yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil regresi model yang digunakan, diketahui bahwa semua variabel

penjelas mempunyai arah atau tanda yang sesuai dengan hipotesis. Dengan kata lain, hasil estimasi terhadap model yang dipilih telah sesuai dengan teori yang dipilih. Adapun ringkasan hasil uji kesesuaian teoritik dari estimasi regresi model terpilih tersaji pada tabel 7.

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa koefisien hasil regresi untuk semua variabel penjelas tersebut sesuai dengan yang dihipotesiskan sehingga dapat dikatakan bahwa model lin-lin yang dipilih sebagai model penelitian lolos dari uji kesesuaian teoritik. Variabel penjelas dimana seluruhnya merupakan besarnya pengeluaran pembangunan pemerintah menunjukkan arah atau tanda koefisien positif (+), hal ini

TABEL 6. Ringkasan Hasil Regresi

Variabel	Koefisien	t-statistik	prob
Konstanta	33969413	2.832062	0.0163
Pendidikan	0.110848	2.133752	0.0562
Kesehatan	0.142458	2.181810	0.0517
Infrastruktur	0.024876	2.602745	0.0246
R2	0.882153		
Adj R2	0.795467		
RSS	5.46E+15		
D-W	1.879701		
F-stat	7.869269		

Sumber : Data diolah

TABEL 7. Hasil Uji Arah atau Tanda

Variabel penjelas	Tanda dihipotesiskan	yang	Hasil estimasi	Kesimpulan
Pendidikan	+		+	Sesuai
Kesehatan	+		+	Sesuai
Infrastruktur	+		+	Sesuai

Sumber: Tabel 6

menunjukkan hubungan yang positif, di mana semakin besar atau meningkat pengeluaran pembangunan pemerintah, maka akan semakin tinggi perekonomian daerah dan begitu pula sebaliknya, dalam hal ini diasumsikan bahwa faktor yang lain tidak berubah (*ceteris paribus*).

Secara umum dapat dijelaskan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah sangat menentukan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Semakin tinggi alokasi belanja daerah ternyata mampu menjadi stimulator perekonomian daerah. Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan belanja pemerintah, khususnya di bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan untuk semakin mengembangkan perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung dapat pula dikatakan bahwa perekonomian Kabupaten Majalengka masih didominasi bersandar pada aktivitas pemerintah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa, beberapa simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah, beberapa di antara faktor tersebut adalah pengeluaran pembangunan pemerintah dalam hal pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara pengeluaran pembangunan pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dengan perekonomian daerah.

Dengan memanfaatkan regresi linier memberikan dukungan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara

pengeluaran pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap perekonomian di Kabupaten Majalengka. Besar dan kecilnya pengeluaran pembangunan pada tiga sektor tersebut akan sangat mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Majalengka.

Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka perlu mengkaji kembali pemanfaatan pengeluaran pembangunan agar lebih diarahkan pada sektor-sektor yang mempercepat perekonomian daerah, dan perlunya mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan di samping dana alokasi umum dari pemerintah pusat dengan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, karena di era otonomi daerah maka daerah itu sendiri yang akan menentukan arah dan kebijakan daerah, sehingga alokasi pengeluaran pembangunan tersebut dapat dijadikan pemacu perekonomian daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka harus lebih meningkatkan lagi alokasi pengeluaran terhadap 3 (tiga) sektor pelayanan dasar yang mendukung terciptanya perekonomian, sehingga pemanfaatan sektor ini yaitu sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dapat dijadikan sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka. ●

Daftar Pustaka

- Arsyad, L. 1999. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Ke-4*.: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta
- Atmaja, 2001. *Peranan Investasi Swasta, Investasi Sektor Publik dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Bali dari Tahun 1995-2000*. Tesis MEP (tidak dipublikasikan).

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majalengka., *Majalengka Dalam Angka*, (Berbagai Terbitan).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, *Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah*, (Berbagai Terbitan)
- Buffers J, Shah A. 1998. Productivity of Public Spending, Sectoral Allocation, Choices and Economic Growth, *Economic Development and Cultural Change Volume.46, No.2, 291-303*
- Blakely, E. 1994. *Planning Local Economic Development, Theory and Practice*, Second Edition, Sage Publications, United State of America.
- Djojohadikusumo, S. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Gujarati, D, 1999. *Essential of Econometrics.*, McGraw-Hill, Inc. Second Edition, London.
- Insukindro, M.R dan Aliman, (2001). Modul Ekonometrika Dasar dan Penyusunan Indikator Unggulan Ekonomi, *Lokakarya ekonometrika dalam Rangka Penjajakan Leading indikator Ekspor di KTI*.
- Jhingan, ML. 1992. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (terjemahan)*, CV Rajawali, Jakarta.
- Kuncoro, M. 2001, *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- _____, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan (teori, masalah, dan kebijakan)*, Edisi Ketiga. AMP YKPN. Yogyakarta
- _____, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang)*, Erlangga. Jakarta.
- Mangkoesebroto, G. 1998. *Ekonomi Publik*, BPFE, Edisi 3, Yogyakarta.
- Rahayu, Siti A.T. *Peranan Sektor Lokal dan Sektor Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Kesenjangan Yang Terjadi di Indonesia (1987-1996)*, Empirika, Nomor 27, 2001. Hal 1-21
- Rosyadi, I. 2000. *Hubungan Pengeluaran Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi*, Tesis MEP (tidak dipublikasikan).
- Samuelson, P. 1997. *Mikroekonomi, edisi keempatbelas (terjemahan)*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Setiati, I. 1996. Pengaruh Penggunaan Variabel Demografi dalam Model Pertumbuhan Ekonomi: Kasus 25 Propinsi di Indonesia, 1983-1992, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia Volume XLIV, Nomor 2, 121-161*
- Todaro, MP, 2000. *Economic Development seventh edition*, Longman Inc, England.
- Wahyuni, H. The Role Of Government In Economic Growth : Evidence From Asia and Pasific Countries, *Jurnal*

UNISIA, Vol. XXX No. 64 Juni 2007

*Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Volume 19, www.djpkpd.go.id
No.1 2004, hal 71-81*

